

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia menempati peringkat ke-3 sebagai negara dengan jumlah kasus *fraud* terbanyak di Asia Pasifik dengan 25 kasus pada awal tahun 2024 (ACFE, 2024). Berdasarkan data Association of Certified Fraud Examiners (2024), 42% kasus *fraud* di Asia Pasifik disebabkan oleh manajer dengan kerugian rata-rata sebesar \$200.000, diikuti oleh pemilik/eksekutif sebanyak 25% kasus dengan kerugian rata-rata sebesar \$1.000.000.

PT Waskita Karya, salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar di sektor konstruksi, terlibat dalam dua skandal besar yang merugikan keuangan negara, yaitu manipulasi laporan keuangan dan proyek fiktif. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat indikasi manipulasi laporan keuangan Waskita Karya selama periode 2018-2021, di mana laporan keuangannya menunjukkan keuntungan, tetapi arus kas justru negatif. Praktik akuntansi yang tidak sesuai ini dilakukan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya (Nuari, 2024).

Selain itu, kasus proyek fiktif di Waskita Karya melibatkan pejabat perusahaan yang membuat proyek-proyek bodong demi keuntungan pribadi. Proyek-proyek tersebut mencakup pembangunan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar, pengadaan tetrapod beton, batu split, dan pasir dengan beberapa perusahaan swasta, serta pembelian lahan fiktif (Martiar, 2023). Kedua tindakan

fraud PT Waskita Karya melibatkan pejabat tinggi perusahaan dan menyebabkan kerugian sekitar Rp 202 miliar, yang berdampak pada hilangnya kepercayaan dari investor dan kreditor. Selain itu, lemahnya tata kelola perusahaan dan kurangnya pengawasan menjadi faktor utama yang memicu terjadinya kasus ini (Nuari, 2024).

Tabel 1.1
DATA PERUSAHAAN SEKTOR INFRASTRUKTUR YANG
TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2020 – 2023

Tahun	Jumlah Perusahaan Terdaftar	Rata-Rata Laba Industri Infrastruktur	Jumlah Perusahaan yang Mengalami Kerugian
2020	53	Rp 341.655.084.129	21
2021	57	Rp 678.723.471.421	20
2022	61	Rp 698.819.309.919	14
2023	66	Rp 690.234.181.772	16

Sumber: Data diolah pada 08 Oktober 2024

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan jumlah perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2020 hingga 2023, serta kinerja industri berdasarkan rata-rata laba dan jumlah perusahaan yang mengalami kerugian. Secara keseluruhan, jumlah perusahaan di sektor ini mengalami peningkatan signifikan dari 53 perusahaan pada 2020 menjadi 66 perusahaan pada 2023. Hal ini mencerminkan adanya ekspansi atau minat tinggi terhadap sektor infrastruktur, yang mungkin didorong oleh proyek-proyek pembangunan di Indonesia.

Rata-rata laba industri infrastruktur mengalami fluktuasi, dengan peningkatan signifikan pada 2021 sebesar Rp 678,7 miliar dibandingkan dengan Rp 341,7 miliar pada 2020. Namun, laba sedikit menurun pada 2023 menjadi Rp 690,2 miliar dibandingkan dengan 2022. Di sisi lain, jumlah perusahaan yang

mengalami kerugian berangsur menurun dari 21 perusahaan pada 2020 menjadi 16 pada 2023. Hal ini menunjukkan perbaikan kondisi keuangan beberapa perusahaan, meskipun masih terdapat beberapa entitas yang menghadapi tantangan profitabilitas, terutama terkait dengan tata kelola dan risiko operasional.

Data ini mencerminkan bahwa meskipun industri infrastruktur memiliki prospek yang baik dalam beberapa tahun terakhir, beberapa perusahaan di sektor ini mengalami kerugian signifikan. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa praktik *fraud* mungkin terjadi di beberapa perusahaan, seperti yang dialami oleh PT Waskita Karya. Praktik *fraud* tersebut merujuk pada kesalahan sengaja atau tidak sengaja dalam laporan keuangan sehingga informasi tersebut tidak sesuai dengan standar akuntansi yang diterima secara luas (Wati & Chandra, 2022). Salah saji dalam laporan keuangan yang material mengakibatkan informasi keuangan menjadi tidak relevan dan tidak dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan (Andy Lau & Serly, 2021).

Teori keagenan melandasi pemahaman mengenai *fraud* yang terjadi di perusahaan. Teori keagenan menggambarkan pemisahan hubungan antara *principle* (pemilik perusahaan) dan *agent* (manajemen perusahaan) (Almasarwah, 2019). Hubungan antara *principle* dan *agent* dapat menyebabkan kondisi informasi yang asimetris dikarenakan manajer mempunyai lebih banyak informasi tentang perusahaan dibanding investor yang mendorong manajer menyembunyikan beberapa informasi dari investor (Wati & Chandra, 2022). Teori ini menyoroiti konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, karena setiap individu cenderung memprioritaskan kepentingan pribadinya. Suwarno et al.

(2021) berpendapat bahwa masalah keagenan akan muncul ketika eksekutif/manajer memanipulasi informasi keuangan perusahaan sebagai cara untuk mencapai motivasi mereka sendiri.

Signalling theory digunakan untuk menjelaskan upaya manajemen untuk memenuhi keinginan pemilik. Karena masalah keagenan dan asimetri informasi, manajer perusahaan dapat mengakses informasi yang tidak tersedia di pasar saham. *Signalling theory* menjelaskan bagaimana perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan mengenai kondisi kesehatan keuangan perusahaan (Arsal, 2021). Manajer yang ingin menunjukkan kesehatan keuangan yang baik mungkin akan melakukan manipulasi informasi keuangan untuk memperlihatkan laba bersih yang terlihat lebih tinggi dari yang sebenarnya. Investor kemudian dapat menafsirkan hal ini sebagai sinyal bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik dan layak untuk diinvestasikan (Panjaitan & Muslih, 2019).

Struktur kepemilikan digunakan sebagai alat untuk mengawasi kinerja manajemen eksekutif dengan tujuan mengurangi konflik kepentingan yang muncul karena pemisahan kepemilikan dari manajemen. Pemilik suatu organisasi dapat mencakup direktur, investor, pemerintah, dan pihak lain, seperti pendiri (Alqirem et al., 2020).

Hubungan keagenan yang melibatkan kendali oleh agen dalam suatu perusahaan cenderung memicu terjadinya konflik keagenan. Konflik keagenan dapat diminimalkan dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan, yang biasa kita sebut dengan kepemilikan manajerial. Kepemilikan

manajerial mengacu pada saham yang dimiliki secara pribadi oleh manajemen perusahaan atau saham yang dimiliki oleh cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya (Arlita et al., 2019).

Semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan, mereka akan cenderung berupaya meningkatkan kinerja perusahaan untuk kepentingan pemegang saham serta kepentingan pribadi mereka sendiri (Arlita et al., 2019). Motivasi manajer yang memiliki saham akan berbeda dari manajer yang tidak memiliki saham. Oleh karenanya, kepemilikan manajerial menjadi faktor terjadinya *fraud* dalam hal manipulasi laba yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alqirem et. al. (2020).

Para analis, investor, eksekutif senior, dan dewan direksi umumnya menempatkan laba sebagai salah satu elemen terpenting dalam laporan keuangan perusahaan publik. Laba yang tinggi dapat menghasilkan pembayaran dividen yang lebih besar kepada pemegang saham (Andy Lau & Serly, 2021). Dividen merupakan indikator kunci yang digunakan untuk mengevaluasi keterlibatan manajemen dalam praktik *fraud*, karena dividen mengalihkan pendapatan perusahaan kepada pemegang saham (Hussain & Akbar, 2022).

Kebijakan dividen memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan investasi oleh investor. Dalam konteks teori sinyal, dividen yang dibayarkan oleh sebuah perusahaan berfungsi sebagai indikator atau sinyal bahwa saham perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik atau menguntungkan (Hussain & Akbar, 2022). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hussain & Akbar (2022) & Padmini et al., (2020) semakin tinggi jumlah pembayaran dividen

akan membatasi manajer dalam melakukan *fraud*. Sementara Andy Lau & Serly (2021) mengungkapkan bahwa kebijakan dividen tidak sepenuhnya berpengaruh dalam praktik *fraud* dikarenakan investor juga memandang *capital gain* sebagai tolok ukur pengembalian dari investasi.

Free cash flow (FCF) juga dianggap sebagai faktor yang dapat memengaruhi terjadinya *fraud*. FCF adalah arus kas yang tersedia untuk dibagikan sebagai dividen kepada semua pemegang saham setelah perusahaan memenuhi kewajibannya dan melakukan investasi. FCF yang tinggi sering kali dianggap sebagai sinyal positif bahwa perusahaan memiliki cukup kas untuk mendukung pertumbuhan dan membayar dividen (Aburishet et al., 2022).

Konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan investor (pemilik) sering kali muncul sehubungan dengan FCF. Manajemen, sebagai agen, mungkin terdorong untuk menggunakan FCF tersebut untuk investasi yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemegang saham atau untuk memperlihatkan kinerja yang lebih baik melalui manipulasi laba (Padmini et al., 2020).

Implikasi kepemilikan manajerial, kebijakan dividen, dan *free cash flow* dapat memengaruhi praktik *fraud*, terutama dalam bentuk manipulasi laba yang diukur menggunakan Beneish M-Score. Beneish M-Score adalah model statistik yang digunakan untuk mendeteksi kemungkinan manipulasi laporan keuangan, khususnya laba (Folajimi et al., 2023). Kepemilikan manajerial yang tinggi dapat memberikan insentif bagi manajemen untuk melakukan manipulasi laba demi mempertahankan nilai saham atau mencapai target keuangan tertentu (Arlita et al., 2019). Di sisi lain, kebijakan dividen akan membatasi manajemen melakukan

manipulasi laba, karena dividen mengalihkan pendapatan perusahaan kepada pemegang saham (Hussain & Akbar, 2022). Sementara itu, *free cash flow* yang besar tanpa pengawasan yang memadai dapat menciptakan peluang bagi manajemen untuk menyembunyikan penggunaan dana atau menggelembungkan laba (Padmini et al., 2020).

Hubungan antara kepemilikan manajerial, kebijakan dividen, dan *free cash flow* terhadap praktik *fraud* dan manipulasi laba mungkin dipengaruhi oleh *corporate governance*. *Corporate governance* merupakan mekanisme yang memastikan bahwa investor memperoleh keuntungan dari aktivitas yang dilakukan manajemen perusahaan. Tata kelola perusahaan yang efektif, melalui struktur kontrol dan pemantauan yang ketat, dapat mengurangi potensi praktik *fraud* manipulasi laba oleh manajer (Fajar & Setyorini, 2021).

Untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh akurat, dapat dipercaya, dan mencerminkan hubungan kausal yang sebenarnya antara variabel, peneliti menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Ketika perusahaan semakin besar, struktur organisasi dan sistem pengendalian internalnya mungkin lebih kompleks. Perusahaan besar cenderung berhati-hati dalam membuat laporan keuangan karena cenderung mendapat perhatian masyarakat. Sebagai hasilnya, manajemen mungkin memiliki keterbatasan untuk melakukan manipulasi laba tanpa terdeteksi (Purnama & Nurdiniah, 2019).

Kasus PT Waskita Karya menyoroti kerentanan sektor infrastruktur di Indonesia terhadap praktik *fraud* dan manipulasi laba. Hal tersebut menjadikan penting untuk dilakukan penelitian mengenai hubungan faktor-faktor seperti

kepemilikan manajerial, kebijakan dividen, dan *free cash flow* terhadap praktik *fraud* dan manipulasi laba dengan dimoderasi *corporate governance* guna mencegah dan meminimalisir dampak *fraud* di sektor infrastruktur.

Dari penelitian terdahulu terdapat *research gap* dengan hasil yang bervariasi. Latar belakang dan fenomena yang terjadi memotivasi peneliti untuk melakukan uji penelitian dengan variabel terkait dengan mengangkat judul Implikasi Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Dividen, dan *Free Cash Flow* terhadap Praktik *Fraud* di Sektor Infrastruktur Indonesia dengan Dimoderasi *Corporate Governance*.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang dominan akan meningkatkan praktik *fraud* dan manipulasi laba?
2. Apakah perusahaan cenderung melakukan *fraud* dan manipulasi laba ketika kebijakan pembayaran dividen perusahaan menurun?
3. Apakah perusahaan dengan *free cash flow* yang tinggi akan meningkatkan praktik *fraud* dan manipulasi laba?
4. Apakah tata kelola perusahaan memengaruhi hubungan kepemilikan manajerial dan praktik *fraud* dan manipulasi laba?
5. Apakah tata kelola perusahaan memengaruhi hubungan kebijakan dividen dan praktik *fraud* dan manipulasi laba?
6. Apakah tata kelola perusahaan memengaruhi hubungan *free cash flow* dan praktik *fraud* dan manipulasi laba?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh hubungan kepemilikan manajerial terhadap praktik *fraud* dan manipulasi laba.
2. Menguji pengaruh kebijakan dividen perusahaan terhadap praktik *fraud* dan manipulasi laba.
3. Menguji pengaruh *free cash flow* terhadap praktik *fraud* dan manipulasi laba.
4. Menguji pengaruh *corporate governance* dalam hubungan kepemilikan manajerial dan praktik *fraud* dan manipulasi laba.
5. Menguji pengaruh *corporate governance* dalam hubungan kebijakan dividen dan praktik *fraud* dan manipulasi laba.
6. Menguji pengaruh *corporate governance* dalam hubungan *free cash flow* dan praktik *fraud* dan manipulasi laba.

1.4 Manfaat Penelitian

Skandal keuangan yang terjadi di PT Waskita Karya memberikan pemahaman mengenai kondisi sektor infrastruktur di Indonesia yang rentan terjadi *fraud*, bahkan ketika laporan audit menunjukkan opini wajar. Dari sudut pandang teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai hubungan antara kepemilikan manajerial, kebijakan dividen, dan *free cash flow* dengan praktik *fraud* dan manipulasi laba, terutama di sektor infrastruktur Indonesia. Studi ini juga memperluas pemahaman tentang bagaimana *corporate governance* berperan sebagai variabel moderasi dalam mengurangi atau

memperburuk praktik *fraud* dan manipulasi laba. Hal ini akan membantu mengisi *research gap* yang ada dan memberikan wawasan baru tentang hubungan antara variabel-variabel seperti struktur kepemilikan, kebijakan dividen, dan *free cash flow* dalam praktik *fraud* dan manipulasi laba dengan *corporate governance* sebagai moderasi.

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengambil keputusan di industri infrastruktur Indonesia dalam merancang kebijakan dan prosedur yang dapat membantu mencegah dan mendeteksi potensi *fraud* dan manipulasi laba. Oleh karenanya, perusahaan dapat mengimplementasikan kontrol internal yang lebih efektif untuk mengurangi risiko kecurangan dan menjaga integritas laporan keuangannya.

Dari segi kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah praktik *fraud* dan manipulasi laba di sektor infrastruktur. Pemerintah dan regulator dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk mengidentifikasi area-area yang rentan terhadap kecurangan dan mengembangkan langkah-langkah preventif yang lebih baik untuk melindungi kepentingan investor dan masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas sektor infrastruktur Indonesia. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi praktik *fraud* dan manipulasi laba, perusahaan dapat membangun lingkungan bisnis yang lebih sehat dan dapat dipercaya, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

1.5 Sistematika Penulisan Proposal

Sistematika penulisan pada penelitian ini dapat memudahkan pembaca dalam mengetahui urutan-urutan pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis mencantumkan sistematika dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah terkait dengan praktik *fraud* di industri infrastruktur Indonesia dan faktor-faktor yang dapat memengaruhinya, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai penelitian terdahulu yang berisi persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini, landasan teori yang digunakan sebagai acuan penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini termuat penjelasan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi masing-masing variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data beserta metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini dijelaskan beberapa sub bab diantaranya gambaran subjek penelitian, analisis data serta pembahasan dari hasil analisis data penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini akan diuraikan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, serta memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.